

BPK Temukan Kesalahan Administrasi Pajak

Pontianak, BERKAT.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat menemukan kesalahan administrasi terkait pengelolaan pajak daerah Kota Pontianak.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Adi

Sudibyo melalui Kasubbag Hukum dan Humas, Sigit Pratama Yudha, menjelaskan pajak daerah Kota Pontianak ada dilaporkan dalam pemeriksaan BPK.

Dari hasil audit, pihaknya menemukan kesalahan administrasi terhadap penge-

lolaan pajak daerah.

Menurut dia, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI ada tiga buku atau tiga jenis laporan, yakni laporan keuangan, laporan sistem pengendalian intern (SPI) serta laporan kepatuhan ter-

hadap undang-undang.

"Nah, dari hasil audit semester II 2010, pajak daerah Kota Pontianak masuk dalam laporan SPI. Jadi, sifatnya hanya kesalahan administrasi. Kita tidak menguji apakah itu melanggar aturan," jelas Sigit dihubungi via telepon selularnya, Minggu kemarin.

Kesalahan administrasi ini disebabkan karena belum tertagih kepada wajib pajak atau belum tertulis.

Sigit mengatakan, pemkot terutama Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak tentunya lebih mengetahui kelemahan-kelemahan yang

LANJUTAN BACA HAL 11

BPK Temukan Kesalahan Administrasidari Hal 1

terjadi di tubuh internalnya.

"Kami hanya minta pemkot segera memperbaiki SPI. Kami juga minta pemkot meningkatkan SPI," tegas Sigit.

Namun, dia menegaskan apabila nanti pihaknya melakukan audit dan menemukan ada indikasi melanggar undang-undang, maka laporan pajak daerah tersebut masuk dalam kategori laporan kepatuhan.

"Apabila sudah masuk laporan kepatuhan, barulah kita berbicara indikasi kebocoran maupun penggelapan pajak," jelas Sigit.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Herri Mustamin, SH, meminta pemkot melakukan pengawasan terhadap pemungut-pemungut pajak.

Dia menilai, ada perselingkuhan jahat

antara petugas pemungut pajak maupun pengelola atau pengusaha.

"Bangkit-bangkit Gayus sudah ada dari zaman dulu. Ini harus diawasi dan ditindak tegas," kata Herri.

Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Deden A. Nugraha, juga tidak menginginkan adanya Gayus-Gayus lain merambah Kota Pontianak.

Dari hasil uji petik terhadap 10 usaha di kota ini, Dispenda Kota Pontianak menemukan perbedaan antara potensi dengan realisasi sebesar Rp223.496.429,37. Yang mana hasil sebelum uji petik realisasi sebesar Rp197.664.715,13 dan setelah diuji petik potensi pajak sebesar Rp421.161.144,50.(ina)